

WDP Masih Manusiawi

KETAPANG - Mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan dari BPKRI terhadap Laporan Keuangan di Kabupaten Ketapang, bukan menjadi persoalan bagi Bupati Ketapang Henrikus.

Dia memandang predikat tersebut sebagai sesuatu yang manusiawi.

"Itu memang menyangkut sistem ya, sistem pelaporan keuangan. Dan mengenai data-data soal aset, hal ini terjadi akibat dampak dari adanya pemekaran kabupaten beberapa waktu lalu, risiko pemekaran ini, baik yang dimekarkan ataupun yang daerah pemekaran, sama, yang paling utama menyangkut aset," kata Bupati, beberapa waktu lalu.

Agar pelaporan keuangan ke depan menjadi lebih baik, Bupati berencana membentuk tim, sehingga bisa melaksanakan tugas khusus yang berkaitan dengan aset, baik yang berkenaan dengan hukum maupun yang lainnya.

Sementara itu, kendati belum pernah meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), anggota DPRD Kabupaten Ketapang, Junaidi, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, legislatif dan eksekutif Kabupaten Ketapang terus berupaya meningkatkan kinerjanya, dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

"Saya yakin, tidak hanya saya, namun juga Pemerintah Kabupaten Ketapang bertekad suatu saat akan mendapatkan predikat WTP," kata Junaidi di Ketapang, belum lama ini. Salah satu upaya yang dilakukan Pemkab, dimisalkan Junaidi, seperti belajar dari daerah lain yang telah sukses meraih predikat WTP. "Tidak hanya

belajar Kota Pontianak, kita juga melakukan studi banding ke beberapa daerah lain, agar juga bisa melakukan hal serupa," jelasnya.

Legislator dari Partai Golkar ini, mengatakan salah satu faktor Ketapang masih belum bisa meraih predikat WTP, karena hingga sekarang hampir di semua dinas atau instansi pemerintahan yang ada, masih belum memiliki kualitas sumber daya manusia yang handal, dalam hal pengelolaan anggaran.

"Makanya saat ini ada beberapa pegawai yang dikirim untuk kembali mengikuti pendidikan akuntansi, sehingga diharapkan ke depan usai pendidikan, bisa kembali dan berkontribusi ke daerah untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapat," terangnya. Karena telah bertekad memperbaiki pengelolaan anggaran, dijelaskan Junaidi bahwa pihak eksekutif dan legislatif di kabupaten ini juga meniru Kota Pontianak, dengan melakukan efisiensi dan efektivitas anggaran.

Misalnya saja, menurut dia, saat ini berupaya menekan anggaran untuk perjalanan dinas. "Kita juga mulai menerapkan jika dalam suatu kunjungan kerja bisa dilakukan hanya dengan mengirim dua orang, jadi tidak perlu lagi mengirim lebih dari dua orang," ucapnya.

Selain itu, menurut Junaidi, saat ini pengadaan dan perbaikan atau rehab kendaraan dinas yang dinilai masih belum penting, juga dikesampingkan terlebih dahulu.

"Saya lebih setuju jika sebagian anggaran yang ada dialokasikan untuk stimulus peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Ketapang," pungkasnya. (ash)